

ADAPTASI SISTEM KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS KAMBING KALIGESING DI PURWOREJO

ADAPTATION OF GOVERNMENT COMMUNICATION SYSTEM IN IMPROVING OF KALIGESING GOAT QUALITY IN PURWOREJO REGENCY

Tatag Handaka

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB),
Universitas Trunojoyo Madura (UTM)
Email: tataghandaka@gmail.com

Hermin Indah Wahyuni, Endang Sulastris, Paulus Wiryono

Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan,
Sekolah Pascasarjana, UGM
Email: hermin_iw@ugm.ac.id; endangs@ugm.ac.id; pwiryono@jesuits.com

Abstract

Population of Kaligesing goat in Purworejo indicates the number continues to increase from year to year. However, increasing in population is not accompanied by an increase in the quality of Kaligesing goat. The objective of the study is to know how adaptation of government communication system on increasing quality of Kaligesing goat in Purworejo regency. The theory of the study is communication system in perspective of Niklas Luhmann. The study was used explorative case study method. Population of this study was conducted in Purworejoregency as the center of Kaligesing goat farming. The technique of collecting data is using indepth interview and observation. The result of the study showed that government communication system was produce and reproduce information as regulation. Those information was used to solved environment complexity in the form of decreasing of Kaligesing goat quality. Government communication system wasn't effective on reducing and selecting environment information. So, information was produced by system not solved environment complexity. Government communication system encountering environmental complexity evolved into an unadaptive system.

Key words: adaptation, government communication system, Kaligesing goat quality

Abstrak

Populasi kambing Kaligesing di kabupaten Purworejo menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun peningkatan populasi ini tidak diikuti dengan peningkatan kualitas kambing Kaligesing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana adaptasi sistem komunikasi Pemerintah dalam peningkatan kualitas kambing Kaligesing di Purworejo. Teori yang digunakan sistem

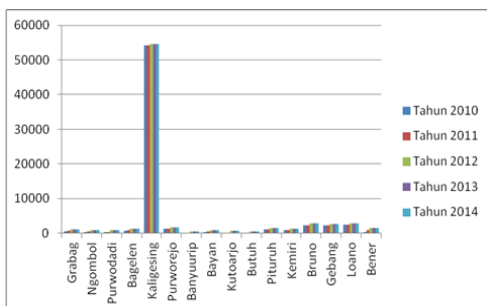
Handaka, Wahyuni, Sulastrri, Wiryono, adaptasi, kualitas,,,

komunikasi dalam perspektif Niklas Luhmann. Metode penelitian adalah studi kasus eksploratif. Populasi penelitian di kabupaten Purworejo yang menjadi sentra budidaya kambing Kaligesing. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem komunikasi Pemerintah telah memroduksi dan mereproduksi informasi berupa regulasi. Informasi ini digunakan untuk menyelesaikan kompleksitas lingkungan berupa penurunan kualitas kambing Kaligesing. Sistem komunikasi Pemerintah tidak efektif dalam mereduksi dan menyeleksi informasi lingkungan. Sehingga informasi yang diproduksi sistem tidak menyelesaikan kompleksitas lingkungan. Sistem komunikasi Pemerintah berevolusi menjadi sistem yang tidak adaptif.

Kata kunci: adaptasi, kualitas kambing Kaligesing, sistem komunikasi Pemerintah.

PENDAHULUAN

Populasi kambing Kaligesing di Purworejo, sebagian besar ada di kecamatan Kaligesing. Kecamatan ini memiliki tujuh puluh persen dari total populasi kambing Kaligesing di Purworejo. Populasi kambing Kaligesing Kabupaten Purworejo (2010-2014) dijelaskan dalam gambar 1:



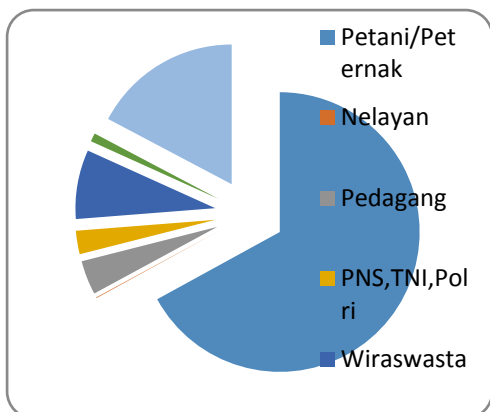
Sumber: DPPKP, 2015 (Diolah)

Gambar 1 Populasi Kambing Kaligesing Purworejo

Populasi kambing Kaligesing di kecamatan Kaligesing sebesar 54.179 ekor (2010), 54.203 ekor (2011), 54.615 ekor (2012), 54.633

ekor (2013), dan 54.644 ekor (2014). Jumlah kambing Kaligesing dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Indikator ini setidaknya menunjukkan bahwa potensi budidaya kambing Kaligesing di Kaligesing memang lebih besar dibanding kecamatan lain di Purworejo.

Populasi kambing Kaligesing di kecamatan Kaligesing yang terus meningkat disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, harga kambing Kaligesing di kecamatan Kaligesing relatif stabil, sehingga banyak peternak yang berminat untuk membudidayakannya. *Kedua*, harga yang stabil tersebut didukung oleh penjualan yang mudah karena ada pasar khusus kambing Kaligesing yaitu pasar *Pendhem*. *Ketiga*, sebagian besar pekerjaan masyarakat Kaligesing adalah peternak/petani. Data tentang jenis pekerjaan masyarakat Kaligesing dijelaskan dalam gambar 2:



Sumber: DPPKP, 2015 (Diolah).

Gambar 2 Jenis Pekerjaan Masyarakat Kaligesing

Jumlah petani/peternak di Kaligesing menempati jumlah terbanyak yaitu 12.477 orang, disusul pekerjaan jasa/lain-lain sebesar 3.215 orang, wiraswasta sebesar 1.489 orang, pedagang sebanyak 735 orang, PNS/TNI/Polri sebanyak 505, Pensiunan sebesar 182 orang, dan terakhir nelayan sebanyak 15 orang. Sebanyak 40,17 persen masyarakat Kaligesing adalah petani/peternak.

Namun populasi yang terus meningkat tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas kambingnya. Beberapa tahun terakhir, Purworejo sudah jarang menjuarai kontes kambing Kaligesing. Juara umum dalam kontes ini berasal dari berbagai daerah, misalnya Malang, Blitar, dan Wonosobo. Pengolahan susu kambing Kaligesing juga lebih banyak dilakukan peternak luar Purworejo, misalnya Sleman, Kulonprogo, Temanggung, Kebumen,

Magelang, Bantul, dan Ponorogo. Penurunan kualitas kambing Kaligesing adalah kompleksitas lingkungan yang dihadapi sistem komunikasi Pemerintah.

Dari deskripsi diatas, dapat diambil rumusan masalah yaitu: “Bagaimana adaptasi sistem komunikasi Pemerintah dalam peningkatan kualitas kambing Kaligesing di Purworejo?”

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem komunikasi dalam perspektif Niklas Luhmann. Sistem senantiasa berada dalam lingkungan, ada banyak sistem dalam lingkungan (Leydesdorff, 2000: 276; Viskovatoff, 1999: 501-502; Lee, 2000: 320; Fuchs, 1999: 117). Sistem tidak lebih kompleks dari lingkungan(Luhmann, 1995: 181-182). Sistem membuat batas-batas untuk dirinya dalam lingkungan (Luhmann, 2002: 160-161; Luhmann, 2000: 11). Batas-batas ini yang membuatnya bersifat tertutup, namun juga sekaligus terbuka (Luhmann, 1992: 254; Albert and Hilkermeier, 2004: 182).

Artinya, sistem bersifat tertutup karena ia harus membedakan diri dengan lingkungan. Sistem tidak berurusan dengan semua informasi lingkungan. Ia hanya memilih informasi yang sesuai dengan kepentingannya. Sistem tidak boleh lebih kompleks dari lingkungan. Namun sistem bersifat

terbuka karena ia harus mengambil informasi lingkungan. Lingkungan terdiri dari berbagai informasi, tapi tidak semua informasi bermanfaat untuk sistem. Ia harus mereduksi dan menyeleksi informasi dari lingkungan. Informasi ini akan ia gunakan untuk memroduksi dan mereproduksi informasi untuk menyelesaikan tantangan dan tuntutan lingkungan (Luhman, 1995: 116-117; Luhman, 1995: 61; Hagen, 2000: 3; Hardiman, 2008: 1-12).

Kompleksitas lingkungan yang dihadapi sistem, membuat sistem harus selalu beradaptasi. Agar ia bisa menyelesaikan berbagai kompleksitas lingkungan yang terus berkembang. Sistem akan terus-menerus dihadapkan dengan kompleksitas lingkungan ini (Luhman, 1995: 368-369; Turner, 2006: 343). Demikian juga dengan sistem komunikasi pemerintah Purworejo dalam menghadapi kompleksitas lingkungan berupa penurunan kualitas kambing Kaligesing.

Penelitian tentang sistem komunikasi pernah dilakukan sebelumnya, misalnya penelitian tentang sistem komunikasi Pemerintah dan kompleksitas ikon kambing PE di Purworejo (Handaka, et.al., 2016: 180-189). Penelitian sistem komunikasi yang berkaitan dengan organisasi (Desautel, 2008); sistem komunikasi dalam kesehatan (Han, 2008); sistem komunikasi yang

dimediasikan computer (*computer mediated communication*) (Holton, 2009).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus eksploratoris (*exploratory case study*). *Case study* adalah sebuah pendekatan yang menggunakan investigasi mendalam terhadap satu atau beberapa fenomena sosial dan menggunakan berbagai sumber data (Jupp, 2006: 20; Daymon dan Holloway, 2005: 105); menelaah detil karakteristik internal setiap kasus dan juga situasi di sekitarnya (Neuman, 2013: 47-48); mendapatkan informasi komprehensif, sistematis dan mendalam tentang tiap kasus yang diteliti (Patton, 2002: 447).

Metode studi kasus melibatkan pengumpulan informasi secara sistematis tentang individu, latar sosial, kejadian atau kelompok agar peneliti bisa memahami secara efektif bagaimana hal itu beroperasi atau berfungsi (Hamel, Dufour & Fortin, 1993 dalam Berg, 2001: 225); juga mengenai komunitas, institusi, aktifitas atau kejadian (Bloor, 2006: 27); "konteks" fenomena dalam studi kasus sangat penting (Shaw and Gould, 2001: 20); dipelajari secara detil, mengembangkan pemahaman lengkap atas kasus (Punch, 1998 dalam Silverman and Marvasti, 2008:

162).Unit analisis yang digunakan untuk membangun teori bisa orang, kelompok, organisasi atau pola tingkah laku (de Laine, 2000: 201).

Populasi penelitian di kabupaten Purworejo dan sampel penelitian di sebelas kecamatan. Purworejo dipilih karena merupakan sentra budidaya kambing Kaligesing di Indonesia. Informan penelitian adalah Kepala Dinas Pertanian Peternakan Kelautan dan Perikanan (DPPKP), Kepala Bidang Peternakan DPPKP, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional (KJF), Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), Petugas Penyuluh Lapang (PPL), Kepala *Breeding Center* (BC), ketua *Village Breeding Center* (VBC), dan ketua kelompok tani (poktan). Informan ini dipilih karena memiliki informasi yang kaya tentang adaptasi sistem komunikasi Pemerintah.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan berdasar *interview guide* yang disusun sebelum wawancara dilakukan. Teknik keabsahan data dengan triangulasi sumber. Keabsahan data dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber: wawancara, observasi, dan sata sekunder. Teknik analisa data menggunakan teori sistem komunikasi dalam perspektif Niklas Luhmann.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sistem komunikasi Pemerintah dalam beradaptasi dengan kompleksitas lingkungan ini, melakukan produksi dan reproduksi informasi. Sistem telah memroduksi berbagai informasi untuk menghadapi kompleksitas lingkungan berupa penurunan kualitas kambing Kaligesing. Informasi yang diproduksi sistem komunikasi Pemerintah berupa regulasi. *Pertama*, regulasi berupa bantuan kambing Kaligesing melalui jalur birokrasi. Bantuan birokrasi bisa berasal dari APBD I (Provinsi) atau APBD II (Kabupaten) atau dari Pusat. Bantuan ini diberikan ke peternak melalui kelompok tani (poktan).

Bantuan kambing Kaligesing jalur birokrasi ini kadang menimbulkan persoalan. Peternak mengaku bahwa bantuan kambing Kaligesing kadang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Peternak yang mendapat bantuan kambing Kaligesing di bawah spesifikasi yang dijanjikan, akan sulit meningkatkan kualitas kambing Kaligesing miliknya.

Peternak yang mendapat bantuan kambing Kaligesing dibawah spesifikasi, akhirnya menjadi tidak serius dalam membudidayakannya. Kondisi ini akan menyulitkan peningkatan mutu genetik kambing Kaligesing di Purworejo. Peternak

yang seharusnya mendapat bantuan spesifikasi B tapi ternyata mendapat C atau bahkan D. Maka kualitas kambing Kaligesing yang dibudidayakan peternak juga tidak akan jauh-jauh dari kualitas itu. PPL juga menilai kadang bantuan Pemerintah sudah disebutkan kambing Kaligesing tapi yang diberikan Jawarandu.

Peternak tidak bisa berbuat apa-apa ketika mendapat bantuan Jawarandu dan bukan kambing Kaligesing. Peternak hanya bisa menerima daripada tidak mendapat bantuan sama sekali. Peternak yang memiliki modal akhirnya membeli sendiri kambing Kaligesing, kadang kualitas kambingnya lebih bagus dari kambing bantuan Pemerintah.

Poktan yang menerima bantuan jalur birokrasi, bukan hanya membudidayakan kambing Kaligesing secara individu atau masing-masing peternak. Tapi ada juga poktan yang membudidayakan kambing Kaligesing dengan kandang komunal. Poktan yang membudidayakan kambing Kaligesing dalam kandang komunal misalnya di Kecamatan Loano dan Kemiri.



Sumber: Koleksi Pribadi (2015)

Gambar 3 Lokasi Kandang Komunal di Kecamatan Kemiri

Kandang komunal di kecamatan Loano berkembang dan masih ada hingga sekarang. Kandang komunal di kecamatan Kemiri sudah tidak ada, yang tersisa adalah bangunan bekas pos penjagaan (gambar 3). Lahan ini dibiarkan kosong begitu saja. Usia budidaya kambing Kaligesing di kandang komunal ini tidak sampai satu tahun. Terhitung sejak kambing Kaligesing bantuan Pemerintah datang hingga bubar.

Kedua, regulasi berupa bantuan kambing Kaligesing melalui jalur aspirasi. Pemberi bantuan dari jalur aspirasi bisa berasal dari DPR/DPRD, fraksi, partai, atau calon

anggota legislatif (caleg). Pihak pemberi kadang membuat poktan untuk menerima bantuan darinya. Pemberi bantuan dari jalur aspirasi sering datang langsung ke poktan dan menyuruh membuat proposal bantuan.

PPL tidak mengetahui bagaimana proses pengajuan bantuan jalur aspirasi. PPL hanya terlibat dalam proses verifikasi, itupun diberitahukan secara tiba-tiba. PPL sering tidak tahu poktan yang akan diverifikasi dan tidak tahu keberadaan poktan tersebut sebelumnya. Setelah bantuan diberikan ke poktan, PPL tidak pernah terlibat lagi. Sehingga PPL tidak tahu ketika Dinas menanyakan program bantuan tersebut, karena memang poktan penerima bantuan tidak pernah berkegiatan. Poktan penerima bantuan bukan merupakan binaan PPL dan BPK.

KJF mengakui bahwa dalam proses bantuan aspirasi, PPL dan BPK tidak dilibatkan. BPK hanya terlibat dalam penandatanganan proposal bantuan yang diajukan poktan, dan PPL dilibatkan untuk memberi penyuluhan ketika bantuan kambing Kaligesing sudah sampai ke poktan.

Proposal bantuan aspirasi ini kadang datang secara mendadak, tiba-tiba poktan minta tanda tangan PPL. Meskipun PPL tidak mau menandatangani proposal, tapi tetap lolos juga. PPL benar-benar merasa

tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi bantuan aspirasi. PPL merasa bahwa bantuan aspirasi tidak bisa ditangani karena terlalu "kuat".

Koordinator BPK sudah membuat daftar poktan yang aktif se-kecamatan dan menyampaikan ke Camat agar tidak menandatangani proposal yang diajukan poktan diluar daftar tersebut. Namun poktan diluar daftar BPK tetap mendapat bantuan aspirasi. Rupanya poktan setelah membuat proposal tidak diserahkan ke BPK tapi langsung ke pemberi bantuan (partai/caleg). Bahkan ada poktan yang mendapat bantuan dulu, proposalnya menyusul belakangan.

Poktan yang menerima bantuan aspirasi sering tidak membudidayakannya tapi malah menjualnya. PPL kadang menemui poktan yang baru saja menerima bantuan, tapi beberapa waktu kemudian kambingnya sudah tidak ada. Poktan kadang hanya melapor kalau kambing Kaligesing bantuan mati. PPL hanya bisa menerima laporan ini karena tidak tahu jumlah kambing bantuan yang diterima poktan. PPL tidak tahu pasti apakah kambing Kaligesing tersebut benar-benar mati atau dijual.

Bantuan aspirasi ini juga menimbulkan kecemburuan antar poktan. Ada poktan yang aktif berkegiatan tidak mendapat bantuan, tapi poktan fiktif justru

mendapat bantuan. Friksi yang terjadi dalam poktan ini kadang menimbulkan persekutuan fisik yang melibatkan anggota-anggota antar poktan.

Sistem komunikasi Pemerintah sudah mereproduksi informasi untuk menanggulangi poktan fiktif dalam bantuan aspirasi. Yaitu dengan membuat persyaratan bahwa poktan penerima bantuan harus berbadan hukum dan setidaknya sudah berkegiatan minimal selama dua tahun. Namun masih ada juga poktan yang tidak berbadan hukum menerima bantuan aspirasi.

Ketiga, regulasi berupa pendirian BC. BC berfungsi sebagai sentra pengembangan dan peningkatan kualitas kambing Kaligesing. Awalnya BC didesain untuk membeli kambing-kambing berkualitas milik peternak. BC kemudian membudidayakan kambing berkualitas ini. Kambing berkualitas yang dibudidayakan BC lalu disebar ke VBC yang ada di Purworejo. VBC yang kemudian bertugas untuk menyebar kambing berkualitas ke seluruh peternak.

Peran BC dan VBC ini akan mencegah kambing berkualitas keluar dari Purworejo. Selain itu BC juga menjadi pusat penerapan teknologi budidaya kambing Kaligesing sebagai plasma nutfah Purworejo. BC menjadi rujukan peternak untuk

belajar teknik budidaya kambing Kaligesing.

Namun dalam perkembangannya, fungsi BC tidak seperti yang direncanakan. BC mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah penyediaan pakan tambahan dan HPT. Pakan tambahan terbatas dan lahan HPT tidak sebanding dengan populasi kambing yang dibudidayakan. Bila musim kemarau tiba, BC mengalami kesulitan dalam penyediaan HPT.

Hal ini lambat laun menyebabkan kualitas kambing BC kalah dengan kambing milik peternak. Kualitas kambing Kaligesing milik peternak lebih baik dibanding milik BC karena beberapa sebab. *Pertama*, kualitas pakan kambing Kaligesing di BC masih kalah dibanding pakan milik peternak. *Kedua*, jumlah asupan tiap ekor kambing Kaligesing di BC masih kalah dibanding asupan pakan milik peternak. *Ketiga*, kualitas bibit kambing Kaligesing milik BC masih kalah dengan kambing milik peternak. Pejantan dan induk kambing Kaligesing milik BC juga masih kalah dibanding milik peternak. Banyak peternak yang memiliki pejantan dan induk kambing Kaligesing jauh lebih bagus dibanding milik BC. *Keempat*, kambing Kaligesing di BC juga masih kalah dalam perawatan dibanding kambing milik peternak.

Keempat, regulasi berupa pendirian VBC, antara lain di kecamatan Gebang, Bener, dan Bruno. VBC di kecamatan Gebang berdiri tahun 2006. Poktan sempat berhasil membudidayakan kambing Kaligesing dan perguliran juga berjalan lancar. Namun lama-kelamaan peternak merasa bahwa budidaya kambing Kaligesing tidaklah mudah. Kambing Kaligesing memerlukan perawatan ekstra, harus lebih teliti, telaten, hati-hati dan terus-menerus. Perawatan kambing Kaligesing sangat berbeda dengan kambing lain, misal Jawarandu. Anggota poktan tidak memiliki pengalaman budidaya kambing Kaligesing sebelumnya.

Persoalan ini ditambah dengan harga kambing Kaligesing mulai menurun sekitar tahun 2010-an. Harga kambing Kaligesing pada saat itu sudah jauh turun dan lama-kelamaan seperti harga kambing Jawarandu. Peternak merugi dengan harga kambing seperti ini. Kerugian ini lama kelamaan semakin besar diderita peternak. Peternak merugi tiap kali menjual kambing Kaligesingnya.

Ketika harga kambing Kaligesing mulai turun, banyak peternak yang belum selesai melakukan penggiliran. Peternak yang menjual kambingnya selalu mengalami kerugian. Kondisi ini mengakibatkan sistem perguliran di VBC berjalan

tersendat. Beberapa anggota poktan tidak bisa lagi menggulirkan dana ke peternak lain. Padahal bila anggota poktan tidak bisa menggulirkan ke peternak lain akan dianggap sebagai hutang.



Sumber: Koleksi Pribadi (2015)

Gambar 4 VBC di Kecamatan Gebang

Persoalan lain yang muncul adalah harga sewa lahan kandang VBC. Pemilik lahan VBC tidak meminta biaya sewa tanah saat awal pendirian VBC. Tapi seiring poktan yang berhasil membudidayakan kambing Kaligesing, pemilik tanah menarik sewa lahan dan poktan menyetujui. Ketika harga kambing Kaligesing masih bagus, poktan tidak kesulitan membayar biaya sewa lahan. Namun dengan harga kambing Kaligesing yang sudah turun, poktan merasa keberatan dengan biaya sewa tersebut. Poktan tidak bisa membayar biaya sewa lahan.

Anggota poktan kemudian mengadakan pertemuan dan memutuskan tidak memperpanjang sewa lahan dan membawa pulang

Handaka, Wahyuni, Sulastri, Wiryono, adaptasi, kualitas,,,

kambing Kaligesing di VBC ke kandang masing-masing. Poktan juga memutuskan untuk merobohkan kandang VBC dan membawa pulang bahan-bahan bangunan yang masih bisa digunakan (gambar 4).

VBC di kecamatan Bener berdiri tahun 2009. Peternak menghadapi kesulitan dalam budidaya kambing Kaligesing. Peternak merasa sulit ketika harus merawat kambing Kaligesing yang melahirkan. Kambing Kaligesing harus lebih sering ditunggui karena induk tidak bisa menyusui anaknya. Peternak juga harus lebih perhatian ketika induk hamil dan mau melahirkan. Bila tidak ditunggui induk dan anak kambing Kaligesing sering mati.

Peternak memang tidak memiliki pengalaman budidaya kambing Kaligesing sebelumnya. Anggota poktan baru tahu budidaya kambing Kaligesing pada pelatihan sebelum bantuan VBC datang. Peternak juga menghadapi persoalan HPT. Hampir semua peternak tidak memiliki tanaman HPT, terutama kaliandra. Pemerintah kemudian memberi bantuan bibit kaliandra. Ketika bantuan bibit ini datang, tidak semua peternak memiliki lahan untuk menanamnya. Rata-rata peternak hanya memiliki lahan sempit dan terbatas. Peternak kesulitan mencari lahan untuk menanam bibit kaliandra. Bahkan ada beberapa

peternak yang lahannya hanya cukup untuk rumah.

Pekerjaan utama penduduk adalah buruh tani, tukang, atau pedagang. Mereka mengandalkan pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Budidaya kambing Kaligesing di VBC adalah pekerjaan sampingan. Persoalan lain yang muncul adalah kendala alam yaitu saat gunung Merapi meletus pada tahun 2011. Abu vulkanik Merapi sampai di desa Mayungsari. Banyak pohon dan rumput yang tertutup abu vulkanik ini, termasuk tanaman HPT untuk kambing Kaligesing.



Sumber: Koleksi Pribadi (2015)

Gambar 5 VBC di Kecamatan Bener

Kondisi jalan dari rumah peternak menuju VBC tidak rata tapi naik turun, sehingga peternak merasa keberatan ketika memberi pakan. Belum lagi bila musim hujan tiba, peternak lebih sulit dan berat mencari HPT dan membawanya ke

kandang VBC. Akhirnya poktan memutuskan untuk membawa kambing Kaligesing di VBC ke rumah masing-masing anggota dan kompleks kandang VBC dibiarkan rusak (gambar 5). Peternak sudah tidak lagi membudidayakan kambing Kaligesing sekarang. Hampir semua peternak menjual kambing Kaligesing dan ganti Jawarandu. Peternak yang masih membudidayakan kambing Kaligesing sangat sedikit. Peternak masih merasa kesulitan dengan budidaya kambing Kaligesing.

VBC di kecamatan Bruno berdiri tahun 2009. Lokasi kompleks VBC di dekat tepi jalan desa, di tepi sungai, dekat pemukiman penduduk. Peternak pernah membudidayakan kambing Kaligesing kira-kira satu tahun sebelum mendapat bantuan VBC. Poktan sempat berhasil menggulirkan kambing Kaligesing sebanyak dua puluh satu ekor ke tiga desa di Kecamatan Bruno. Anggota poktan terdiri dari tujuh puluh anggota, semua warga dusun Krajan menjadi anggota poktan.

Kualitas kambing Kaligesing untuk VBC ternyata tidak sesuai dengan harapan peternak. Kambing Kaligesing yang dikirim berkualitas jelek dan dari kelas biasa. Kualitas kambing Kaligesing yang dimiliki peternak masih lebih baik dibanding kambing bantuan yang diterima. Peternak kecewa dengan bantuan

kambing Kaligesing untuk dibudidayakan di VBC.

Peternak yang mendapat jatah bantuan kambing Kaligesing, mendapatkan kualitas agak baik paling hanya setengahnya. Peternak kemudian mencoba menjual kambing Kaligesing yang jelek dan ingin menukarnya dengan yang lebih baik. Tapi harga kambing Kaligesing kualitas bagus masih mahal. Peternak tidak bisa meningkatkan kualitas kambing karena bibitnya jelek.

Kekecewaan ini bertambah ketika kambing Kaligesing ini banyak yang sakit dan kemudian mati. Persoalan lain yang muncul adalah ketika peternak menjual kambing Kaligesing, harganya tidak seperti yang diharapkan. Harga kambing Kaligesing rendah dan peternak merugi. Hasil penjualan kambing tidak sesuai dengan biaya dan tenaga yang sudah dikeluarkan selama pembudidayaan.

Ada peternak yang menjual kambing Kaligesing bantuan Pemerintah dan menggantinya dengan kambing Kaligesing yang lebih baik kualitasnya. Setelah peternak membudidayakan dan kemudian menjualnya, peternak juga tetap merugi. Padahal kualitas kambing Kaligesing yang dijual ini lebih baik daripada sebelumnya. Harga kambing Kaligesing di Bruno tidak setinggi Kaligesing. Pedagang memberi harga

kambing Kaligesing seperti kambing Jawarandu. Peternak juga pernah menjual kambing ke pasar *Pendhem* (kecamatan Kaligesing), tapi juga mendapat harga yang tidak bagus. Peternak tetap merugi ketika menjual kambing.

Persoalan lain yang muncul adalah sewa lahan kandang VBC. Harga sewa lahan ini sudah ditentukan sebelum kambing bantuan datang. Sehingga poktan sudah memiliki hutang sebelum VBC dijalankan. Harga sewa lahan ini naik di tahun berikutnya. Padahal poktan belum mendapat keuntungan dari budidaya kambing Kaligesing. Poktan tidak sanggup membayar hutang sewa lahan. Akhirnya poktan memutuskan untuk membongkar kandang dan membawa pulang kambing ke rumah masing-masing. Peternak tidak bisa hanya mengandalkan budidaya kambing Kaligesing untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian besar peternak bekerja sebagai buruh tani untuk menopang hidup. Budidaya kambing Kaligesing hanya pekerjaan sampingan.

Kelima, regulasi berupa pembangunan Satuan Kerja Pembibitan Ternak (Satker PT). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun kompleks Pembibitan Ternak Kambing Kaligesing di Desa Gogoluwas, Kecamatan Kaligesing. Satker ini berada dibawah Balai Pembibitan dan Budaya Ternak (BPBT) Dinas

Peternakan Provinsi. Satker ini awalnya bernama Taman Ternak, dan dalam perjalanannya berubah menjadi UPT.

Salah satu peran Satker PT adalah sebagai pusat pembibitan ternak yang dapat menghasilkan bibit yang berkualitas sesuai standar mutu bibit yang telah ditentukan. Tugas pokok Satker adalah melaksanakan pembiakan ternak secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu juga menyediakan bibit ternak yang berkualitas, dalam jumlah yang cukup, dan sesuai selera pasar. Fungsinya adalah melaksanakan pelestarian kambing Kaligesing sebagai plasma nutfah Jateng dan mempertahankan kemurniannya.

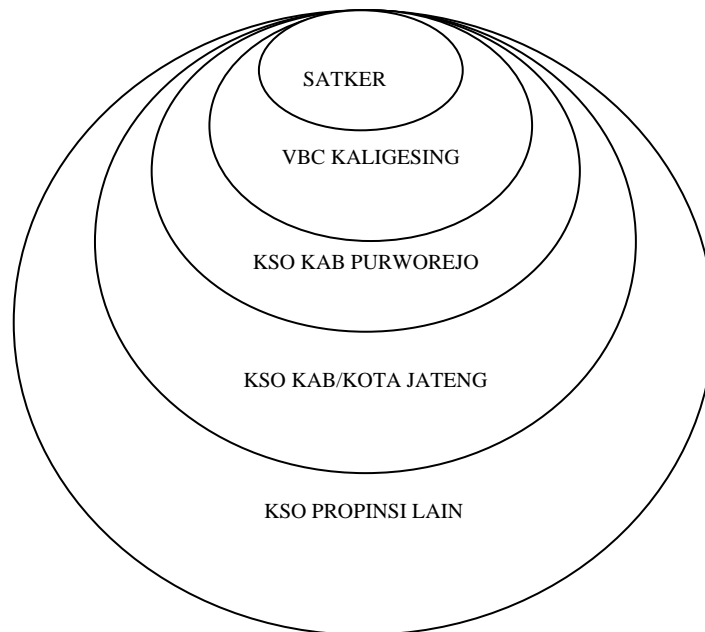
Tujuan Satker adalah menyediakan bibit ternak dan meningkatkan kesejahteraan petani peternak. Juga terbentuknya pusat-pusat pembibitan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Salah satu sasaran umum Satker adalah terciptanya hasil keturunan ternak yang berkualitas dan sesuai dengan *grade* unggul. Keturunan yang dihasilkan memiliki *grade* tetap (Satker PT, 2008: 1-20).

Namun kualitas kambing Satker PT masih kalah dengan milik peternak Kaligesing. Kepala UPT Satker menilai bila kambing Kaligesing-nya tidak sebaik milik peternak karena beberapa faktor. *Pertama*, kualitas bibit kambing

Kaligesing yang dibudidayakan Satker tidak sebaik milik peternak. Satker tidak memiliki pejantan PE sebaik milik peternak. Sehingga sulit menghasilkan bibit kambing Kaligesing berkualitas. *Kedua*, jenis pakan ternak di satker tidak sebaik dan sebanyak milik peternak. Selain jenis juga volume pakan yang diberikan untuk tiap ekor kambing berbeda antara yang di Satker dan peternak.

Satker PT merupakan pusat untuk pengembangan perbibitan kambing Kaligesing. Satker membudidayakan kambing Kaligesing

berkualitas dan mendistribusikannya ke VBC yang ada di Kaligesing. VBC ini akan membudidayakan lagi dan menyebarkannya ke seluruh peternak Kabupaten Purworejo. Peternak secara bersama-sama membudidayakan kambing Kaligesing dan menjualnya ke peternak yang berasal dari seluruh KSO Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. KSO di masing-masing daerah ini yang akan menjualnya ke seluruh KSO Provinsi lain di Indonesia. Strategi ini dijelaskan dalam gambar 6 (Satker PT, 2008):



Gambar 6 Strategi Pengembangan Perbibitan Satker PT

Persoalannya adalah VBC di Kaligesing dan Kecamatan lain sudah tidak ada. Bila strategi pengembangan perbibitan Satker hanya

mengandalkan distribusi melalui VBC dan tidak memiliki jalur alternatif. Maka Satker tidak bisa mendistribusikan kambing Kaligesing keluar

karena VBC sudah bubar. Ketiadaan VBC akan menghambat strategi pengembangan perbibitan Satker karena tidak bisa mendistribusikan kambing Kaligesing ke Kabupaten Purworejo, Kabupaten/Kota di Jateng dan Provinsi lain.

Keenam, regulasi berupa Penetapan Wilayah Sumber Bibit (PWSB). Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan PWSB ternak melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/OT/2011. Sistem komunikasi Pemerintah kemudian memproduksi kebijakan Penetapan Wilayah Sumber Bibit (PWSB) untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas yang berkelanjutan dari budidaya kambing Kaligesing. Kepala DPPKP mengeluarkan SK No. 188.4/814.B/2015 tentang Penunjukan Tim Pendamping Pewilayahan Sumber Bibit Kambing Kaligesing.

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa PWSB adalah serangkaian kegiatan untuk memetakan suatu wilayah dengan agroekosistem tertentu sebagai wilayah sumber bibit. Wilayah sumber bibit adalah suatu wilayah agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif Pemerintah dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis, rumpun, atau galur ternak tertentu.

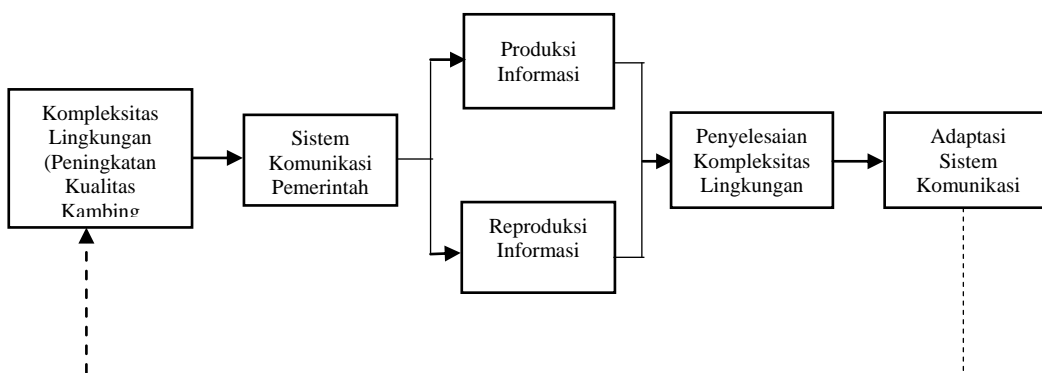
Tujuan kegiatan PWSB di Kecamatan Kaligesing khususnya dan Kabupaten Purworejo umumnya adalah, *pertama*, terlaksananya pewilayahan sumber bibit kambing Kaligesing yang memenuhi kriteria sebagai wilayah sumber bibit, yang berbasis pada kearifan lokal. *Kedua*, terlaksananya pembibitan ternak kambing Kaligesing pada wilayah sumber bibit di Purworejo. *Ketiga*, terlaksananya recording yang baik pada kelompok-kelompok pembibitan. *Keempat*, Diperoleh data kuantitatif ternak baik induk, calon induk/dara, pejantan dan calon pejantan. *Kelima*, peningkatan kesejahteraan kelompok peternak perbibitan kambing Kaligesing di Kaligesing.

Hasil yang diharapkan dari program PWSB adalah, *pertama*, terlaksananya kegiatan usaha pembibitan kambing Kaligesing oleh masyarakat, poktan dan Pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip perbibitan, terintegrasi dengan kegiatan yang mempunyai nilai sinergis dalam pengembangannya. *Kedua*, tersedianya bibit kambing Kaligesing yang berkualitas dan bersertifikasi. *Ketiga*, tumbuh dan berkembangnya UPT Perbibitan oleh Pemkab Purworejo, yang merupakan pusat pendidikan dan pelatihan dalam mengolah usaha perbibitan di masyarakat atau korporasi (DPPKP, 2015: 14-15).

Pembahasan

Sistem selalu berada dalam kompleksitas lingkungan (gambar 7). Demikian juga dengan sistem komunikasi Pemerintah, ia berada dalam kompleksitas lingkungan. Salah satu kompleksitas lingkungan yang dihadapi sistem komunikasi Pemerintah adalah peningkatan

kualitas kambing Kaligesing. Lingkungan ini terdiri dari berbagai informasi. Semua informasi masih bersifat tidak jelas dan tidak terprediksi (*equivocality*). Tugas sistem untuk mereduksi dan menyeleksi informasi agar menjadi lebih jelas dan terprediksi



Gambar 7 Adaptasi Sistem Komunikasi Pemerintah

Sistem akan menggunakan informasi ini untuk memroduksi dan mereproduksi informasi, bisa berupa regulasi, wacana, atau struktur. Sistem menggunakan informasi yang ia produksi untuk menyelesaikan kompleksitas lingkungan. Tuntutan dan tantangan lingkungan mengharuskan sistem untuk terus memroduksi dan mereproduksi informasi agar ia selalu adaptif dengan kompleksitas lingkungan (garis putus-putus).

Sistem komunikasi Pemerintah dalam menghadapi kompleksitas lingkungan berupa penurunan kualitas kambing Kaligesing, telah

memroduksi dan mereproduksi informasi. Berupa bantuan birokrasi, bantuan aspirasi, BC, VBC, satker peternakan, dan PWSB.

Regulasi bantuan birokrasi telah membantu peternak dalam peningkatan populasi kambing Kaligesing, namun bukan pada peningkatan kualitas. Peternak mendapat bantuan kambing Kaligesing dari Pemerintah dengan kualitas yang tidak bagus (B, C atau D). Jadi sistem komunikasi menghadapi tuntutan dan tantangan penurunan kualitas, tapi informasi yang dihasilkan ditujukan untuk peningkatan populasi.

Demikian juga dengan bantuan aspirasi, alih-alih meningkatkan kualitas kambing Kaligesing. Bantuan jalur ini dalam beberapa kasus justru menimbulkan friksi sosial antar poktan di desa. Poktan yang aktif berkegiatan tidak mendapat bantuan, tapi poktan yang tidak aktif berkegiatan justru mendapat bantuan. Persoalan ini kadang menimbulkan kecemburuan antar poktan.

Hal ini disebabkan oleh dua kemungkinan, *pertama*, sistem komunikasi Pemerintah tidak efektif dalam mereduksi dan menyeleksi informasi lingkungan. Sehingga tuntutan dan tantangan lingkungan tidak benar-benar dipahami sistem. *Kedua*, reduksi dan seleksi informasi lingkungan sudah efektif, namun produksi informasi tidak sesuai dengan kompleksitas lingkungan.

Tuntutan dan tantangan lingkungan berupa penurunan kualitas kambing Kaligesing, tapi informasi yang diproduksi berupa peningkatan populasi. Sementara sistem tidak efektif dalam menyeleksi kompleksitas lingkungan berupa poktan yang aktif dan tidak aktif. Sehingga regulasi berupa bantuan aspirasi salah sasaran dan menimbulkan friksi.

Produksi dan reproduksi informasi BC dan VBC juga tidak menyelesaikan kompleksitas penurunan kualitas kambing Kaligesing.

Sistem tidak efektif dalam mereduksi dan menyeleksi informasi lingkungan. Ketika VBC tidak berhasil dalam budidaya dan peningkatan kualitas kambing kaligesing. Seharusnya sistem mempelajari atau mengevaluasi regulasi ini.

Tapi sistem tidak melakukan mekanisme evaluasi untuk mereduksi informasi lingkungan sehingga menjadi lebih jelas dan terprediksi. Sistem bisa mempelajari faktor-faktor penyebab VBC tidak berhasil membudidayakan dan meningkatkan kualitas kambing Kaligesing. Evaluasi ini penting untuk menjadi dasar bagi reproduksi informasi berikutnya.

Namun tanpa ada evaluasi terhadap VBC kecamatan Gebang, sistem mereproduksi informasi berupa regulasi pendirian VBC di kecamatan Bener. Sistem tidak benar-benar memiliki informasi yang memadai tentang kompleksitas yang dihadapi. Kompleksitas lingkungan masih berupa informasi yang tidak jelas. Dalam kondisi seperti ini mestinya sistem menahan diri untuk tidak mereproduksi informasi. Tapi sistem tetap mereproduksi informasi.

Akhirnya regulasi VBC kecamatan Bener juga tidak berhasil membudidayakan dan meningkatkan kualitas kambing Kaligesing. Padahal kambing Kaligesing di VBC kecamatan Bener lebih berkualitas dibanding VBC di kecamatan Gebang. Ternyata poktan yang mengelola VBC

tidak memiliki pengalaman budidaya kambing Kaligesing. Peternak tidak siap dengan teknik budidaya kambing Kaligesing yang berbeda dengan kambing Jawarandu. Peternak juga tidak memiliki lahan yang cukup untuk penanaman Kaliandra (HPT).

Kompleksitas lingkungan ini seharusnya membuat sistem menginisiasi mekanisme evaluasi untuk mereduksi dan menyeleksi informasi. Tapi sistem tidak melakukan reduksi dan seleksi informasi. Sistem malah mereproduksi regulasi pendirian VBC di kecamatan Bruno. Tanpa ada reduksi dan seleksi informasi, reproduksi informasi ini menjadi riskan. VBC Bruno tidak berhasil membudidayakan dan meningkatkan kualitas kambing Kaligesing. VBC ini hanya bertahan kurang lebih selama satu tahun. VBC ini akhirnya bubar seperti dua VBC sebelumnya.

Produksi informasi tentang pendirian satker juga tidak efektif meningkatkan kualitas kambing Kaligesing. Hal ini disebabkan karena, pertama, satker PT tidak berhasil meningkatkan kualitas kambing Kaligesing. Kedua, distribusi kambing dari satker PT melalui VBC, padahal VBC sudah tidak ada di Purworejo. Sehingga strategi pengembangan satker PT tidak berjalan sesuai rencana.

Sistem komunikasi Pemerintah juga tidak efektif dalam

mereduksi dan menyeleksi informasi lingkungan terkait kapasitas poktan. Sistem kadang memberikan bantuan tanpa mengevaluasi kapasitas poktan dalam budidaya dan peningkatan kualitas kambing Kaligesing. Kadang poktan baru terbentuk ketika bantuan akan diberikan. Selain itu juga pengetahuan peternak tentang budidaya kambing PE tidak dipersiapkan dengan baik.

Poktan yang dibentuk karena mau ada bantuan dan poktan yang dibentuk oleh kesadaran para anggotanya memang memiliki ketahanan beda. Poktan yang pertama kadang dibentuk karena ditunjuk oleh Pemerintah untuk membentuk poktan. Jadi poktan ini dibentuk karena mendapat perintah, bukan kemauan dirinya sendiri. Poktan ini akan kompak dan kuat ketika bantuan turun.

Namun biasanya bila kas/keuangan poktan mulai sedikit/minim, poktan akan kendor dan sering anggotanya banyak yang keluar. Demikian juga poktan yang mengelola VBC di kecamatan Gebang, mereka aktif berkegiatan di awal pendirian VBC. Tapi ketika berbagai persoalan menerpa poktan, mereka mulai mengendor. Berbeda dengan poktan yang kedua, poktan ini akan tetap eksis ketika ada bantuan atau tidak ada bantuan. Bahkan poktan jenis ini bisa bertahan tanpa mengandalkan bantuan.

KESIMPULAN

Sistem komunikasi Pemerintah menghadapi tuntutan dan tantangan lingkungan berupa penurunan kualitas kambing Kaligesing. Sistem mereduksi dan menyeleksi informasi dari lingkungan. Informasi ini kemudian digunakan sistem untuk memroduksi dan mereproduksi informasi guna menyelesaikan kompleksitas lingkungan. Sistem sudah memroduksi dan mereproduksi informasi berupa regulasi bantuan birokrasi, bantuan aspirasi, BC, VBC, satker PT, dan PWSB.

Informasi ini ada yang menyelesaikan kompleksitas lingkungan, namun lebih banyak tidak menyelesaikan kompleksitas lingkungan. Sistem tidak mereduksi dan menyeleksi kompleksitas lingkungan ini. Sistem malah mereproduksi informasi berikutnya untuk menyelesaikan kompleksitas lingkungan. Reproduksi informasi ini tidak menyelesaikan kompleksitas lingkungan terkait penurunan kualitas kambing kaligesing. Sistem komunikasi Pemerintah dalam menghadapi kompleksitas lingkungan telah berevolusi menjadi sistem yang tidak adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, M.& Hilkermeier, L. (ed). 2004.*Observing international relations: Niklas Luhmann and world politics*. New York: Routledge.
- Berg, B.L.2001.*Qualitative research methods for the social sciences*. Boston: Allyn and Bacon.
- Bloor, M.& Wood, F.2006.*Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts*. California: SAGE Publications Inc.
- Daymon, C.& Holloway, I.2005. *Qualitative research methods in public relations and marketing communications*. New York: Routledge.
- De Laine, M.2000. *Fieldwork, participation and practice: Ethics and dilemmas in qualitative research*. London: SAGE Publications Ltd.
- Desautel, C. 2008. Communication systems in high performing servanthood cultures. (*Dissertation*). Faculty of the School of Professional Studies. Gonzaga University.
- DPPKP Kabupaten Purworejo. 2015. *Proposal Usulan Penetapan Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing (Kambing PE) di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah*. Dokumen tidak Dipublikasikan.
- Fuchs, S.1999. Niklas Luhmann. *Journal of Sociological Theory*,

- 17(1),117-119. American Sociological Association.
- Hagen, R.2000. Observing Luhmann. *Acta Sociologica*, 43(1), 3-4. SAGE Publications Ltd.
- Handaka, T. 2016. Sistem komunikasi Pemerintah dan kompleksitas ikon kambing PE di kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, X(2), 180-189. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB), Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
- Han, J.Y. 2008. Examining effective use of an Interactive Health Communication System (IHCS). (*Dissertation*). Department of Mass Communication. University of Wisconsin. Madison.
- Hardiman, F.B.2008. Teori sistem Niklas Luhmann.*Jurnal Filsafat Driyarkara*,XXIX(3). Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara.
- Holton, C.F. 2009. The impact of Computer Mediated Communication (CMC) systems monitoring on organizational communications content. (*Dissertation*). Department of Mass Communication. University of Wisconsin. Madison.
- Jupp, V.2006.*The Sage dictionary of social research methods*. London: SAGE Publications Ltd.
- Lee, D.2000. The society of society: The grand finale of Niklas Luhmann.*Journal of Sociological Theory*, 18. American Sociological Association.
- Leydesdorff, L.2000.Luhmann, Habermas, and the theory of communication.*Journal of Systems Research and Behavioral Science*, 17(3), 273-288.
- Luhmann, N.1992.What is communication.*Journal of the International Communication Association*, 2(3), 251-259, ISSN: 1050-3293.
- Luhmann, N.(1995).*Social systems*. Translated by John Bednarz, Jr. with Dirk Baecker. Stanford: Stanford University Press
- Luhmann, N.2000.*The reality of the mass media*. Translated by Kathleen Cross. California: Stanford University Press.
- Luhmann, N.2002.*Theories of distinction: Redescribing the description of modernity*. Translated by Joseph O'Neil [et al.]. California: Stanford University.
- Neuman, W.L.2013.*Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. 7th edition.Diterjemahkan oleh Edina T. Sofia. Jakarta: PT. Indeks.

Handaka, Wahyuni, Sulastri, Wiryono, adaptasi, kualitas,,,

- Patton, M.Q.2002. *Qualitative research and evaluation methods*. 3rd edition. California: SAGE Publications, Inc.
- Shaw, I.& Gould, N.2001.*Qualitative social work research*. London: SAGE Publications Ltd.
- Silverman, D.& Marvasti, A.2008. *Doing qualitative research: A comprehensive guide*. California: SAGE Publications, Inc.
- Turner, B.S.2006.*The Cambridge dictionary of sociology*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Kerja Pembibitan Ternak, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah. 2008. *Hand-Out Satuan Kerja Pembibitan Ternak Kambing Peranakan Ettawa (PE) di Kaligesing*. Dokumen tidak Dipublikasikan.
- Viskovatoff, A.1999. Foundations of Niklas Luhmann's theory of social systems.*Journal of Philosophy of the Social Sciences*, 29(4), 481-516.